

ARTIKEL

**KIPRAH PWI (PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA) MAKASSAR
TERHADAP KEBEBASAN PERS DI MAKASSAR
(1974-1998)**

***THE GAIT OF MAKASSAR BRANCH INDONESIA JOURNALISTS ASSOCIATION
ON PRESS FREEDOM IN MAKASSAR
(1974-1998)***

ANDIRWAN SAPUTRA



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
2018**



**KIPRAH PWI (PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA) MAKASSAR
TERHADAP KEBEBASAN PERS DI MAKASSAR (1974-1998)**

ANDIRWAN SAPUTRA

Pendidikan Sejarah
Program Pascasarjana
Universitas Negeri Makassar
email: andir138@gmail.com

Abstrak : penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan PWI terhadap kebebasan pers makassar, mendeskripsikan perkembangan pers makassar setelah peristiwa malari, mendeskripsikan keterlibatan PWI terhadap perkembangan kebebasan pers makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian sejarah yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang menggunakan metode sejarah dalam penyusunan dan prosesnya berfokus pada pembahasan sejarah PWI serta eksistensi dan peran PWI Makassar sebagai lembaga pers pada masa Orde Baru. Teknis analisis data dilakukan dengan empat tahapan yaitu melalui heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Obsesi dalam sistem Pers Pancasila memang diperlukan keseimbangan antara kebebasan dan tanggungjawab pers yang kemudian menyebabkan pemerintah merasa perlu melakukan berbagai pembatasan kebebasan pers demi tercapainya stabilitas dan ketertiban. Melalui PWI pemerintah memperketat pengawasan terhadap wartawan maupun orang-orang yang hendak menjadi wartawan. Bergulirnya keterbukaan pers sebab banyak kemudian bermunculan pengusaha pers yang tidak lagi bergantung pada pemerintah. PWI dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengontrol wartawan dalam hal keanggotaan maupun kode etik.

Kata kunci : Kebebasan Pers, PWI



***THE GAIT OF MAKASSAR BRANCH INDONESIA JOURNALISTS ASSOCIATION
ON PRESS FREEDOM IN MAKASSAR
(1974-1998)***

ANDIRWAN SAPUTRA

Pendidikan Sejarah
Program Pascasarjana
Universitas Negeri Makassar
email: andir138@gmail.com

Abstract: This research aims to explain PWI's view on the freedom of the Makassar press, to describe the development of the Makassar press after the Malari incident, to describe PWI's involvement in the development of the freedom of the Makassar press. This type of research is a descriptive historical research using a qualitative approach, which uses historical methods in the preparation and process of focusing on PWI's historical discussion and the existence and role of the PWI Makassar as a press institution during the New Order era. Data analysis techniques are carried out in four stages, namely through heuristics, source criticism, interpretation and historiography. The results showed that; The obsession in the Pancasila Press system is indeed necessary a balance between freedom and responsibility of the press which then causes the government to feel the need to carry out various restrictions on press freedom in order to achieve stability and order. Through the PWI, the government tightens supervision of journalists and people who want to become journalists. The rolling openness of the press because many press businessmen then emerged who were no longer dependent on the government. PWI is used by the government to control journalists in terms of membership and code of ethics.

Keywords: Press Freedom, PWI

PENDAHULUAN

Keberadaan pers dalam kehidupan masyarakat menjadi satu hal yang sangat penting, terutama karena perannya dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi. Pada dasarnya pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik. Kegiatan jurnalistik yang dimaksud dalam pengertian tersebut adalah proses mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Berdasarkan dengan perubahan sistem politik yang berlaku, peraturan perundang-undangan datang silih berganti, berisi aturan yang membatasi bahkan melenyapkan kemerdekaan pers. Sebab ia dijadikan wahana tarik menarik kepentingan antara masyarakat dan pemerintah tanpa pers sendiri diberikan otonomi untuk memilih kebijakan yang diinginkan (Nurudin, 2007: 83).

Selanjutnya, pada 12 Oktober 1960, keluar lagi Peraturan Penguasa Tertinggi No. 10/1960 mengenai keharusan bagi penerbit untuk

memperoleh izin terbit (Said, 1988: 123). Untuk bisa terbit, setiap penerbitan pers wajib memiliki Surat Izin Terbit.

Pada saat pemerintah dan pers sepakat untuk membangun sistem pers Pancasila, dengan menggunakan konsep jurnalistik pembangunan, mengembangkan hubungan kemitraan pers-pemerintah-masyarakat, dan lain-lain. Konsep ini kemudian justru membatasi ruang gerak pers karena pers diarahkan pemerintah untuk mendukung pembangunan. Hakekat Pers Pancasila adalah pers yang sehat yakni pers yang bebas dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang benar dan objektif, penyalur aspirasi rakyat dan kontrol sosial yang konstruktif. (Atmadi, 1985: 50).

Pada prinsipnya konsep ini menganut kepemilikan pers ditangan swasta, tanpa kontrol pemerintah, namun dalam kondisi negara yang sedang berkembang pers harus menerima tugas pembangunan. Dalam hal ini pers juga harus menerima bantuan dan pembinaan dari pemerintah yang pada praktiknya dapat menimbulkan masalah independensi pada pers. Sewaktu Dewan Pers mengeluarkan keputusan tentang pedoman pembinaan ideal pers pada bulan Desember 1974, hal ini adalah

menyusul peristiwa-peristiwa memprihatinkan yang menimpa beberapa surat kabar (Said, 1988: 199).

Bagi pemerintah, pers identik dengan politik. Media massa yang mau hidup dan berumur panjang harus “menghindari” berita-berita politik, kecuali berita politik “pesanan”. Mengabaikan “ketentuan” itu berakibat fatal (Santing, 2011: 38). Beberapa minggu setelah aksi unjuk rasa tersebut, ada 12 penerbitan kehilangan Surat Izin Terbit (SIT) dan Surat Izin Cetak (SIC) mereka yaitu: *Nusantara*, *Harian KAMI*, *Indonesia Raya*, *Abadi*, *The Jakarta Times*, *Mingguan Senang*, *Pemuda Indonesia*, *Majalah Berita Minggu*, *Ekspres*, *Pedoman* (Semuanya di Jakarta), *Suluh Berita* (Surabaya), *Mahasiswa Indonesia* (Bandung), dan *Indonesia Pos* (Ujung Pandang). (Hill, 2010: 37-38).

Pers dituduh telah “menjurus kearah usaha-usaha melemahkan sendi-sendi kehidupan nasional, dengan mengobarkan isu-isu seperti modal asing, korupsi, dwi fungsi, kebobrokan aparat pemerintah, merusak kepercayaan masyarakat pada kepemimpinan nasional, menghasut rakyat untuk bergerak mengganggu ketertiban dan keamanan negara, menciptakan peluang untuk mematangkan situasi yang menjurus pada perbuatan makar”.

Pengakuan pemerintah atas PWI sebagai satu-satunya organisasi kewartawan pada tahun 1975 memberi peran penting kepada PWI sebagai satu-satunya wadah pemersatu wartawan secara nasional (Said, 1988: 169). Hal ini kemudian berdampak pada timbulnya tekanan-tekanan dari pemerintah kepada PWI untuk membatasi kebebasan pers itu sendiri. Dapat dilihat pada kasus *Simponi* yang mencoba bangkit kembali langsung diblokir setelah edisi pertama terbit. Pemblokiran tersebut datang langsung dari jantung PWI (yang disetir oleh Menteri Penerangan Harmoko) dan lembaga pro pemerintah SPS yang bergandeng tangan dengan Direktur Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika (Hill, 2011: 79).

Sebagai satu-satunya organisasi kewartawanan yang diakui pemerintah PWI punya kuasa untuk menentukan siapa-siapa yang bisa masuk kedalam industri pers. Berangkat dari hal itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap PWI terkhusus pada saat setelah terjadinya peristiwa Malari dikarenakan akibat dari peristiwa tersebut berdampak pada munculnya beberapa kasus pembredelan pers oleh pemerintah dan memperkuat belenggu pemerintah terhadap kebebasan pers.

METODE

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian sejarah (*Historical Research*). Tujuan Penelitian historis adalah untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasikan, mensintesis bukti-bukti untuk mendukung fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat (Sumadi, 2003: 73). Metode ini merupakan merupakan suatu cara yang tersusun secara sistematis, yang digunakan dalam meneliti sumber-sumber sejarah secara kritis yang mengindikasikan bahwa metode sejarah memiliki tahap-tahap atau langkah-langkah yang terstruktur. Secara teoretis, dalam penelitian sejarah dilakukan melalui empat tahapan metode penelitian yakni: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil pengolahan data kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan secara kronologi suatu peristiwa yang menjadi fokus pembahasan dalam hal ini eksistensi dan peran PWI Makassar terhadap kebebasan pers di Makassar tahun 1974-1998.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dipaparkan sebagai berikut:

Pandangan PWI Terhadap Kebebasan Pers

PWI sebagai komponen penting dalam pembinaan pers didirikan tahun 1946. Pada saat itu di Indonesia sedang berkobar revolusi fisik atau konfrontasi bersenjata melawan Belanda yang mencoba untuk kembali berkuasa. Peran dan eksistensi pers pada saat itu lebih dirasakan sebagai “alat perjuangan nasional”. Untuk itu para tokoh pers Indonesia bertekad untuk bersatu dalam menghadapi kondisi tersebut. Maka dibentuk PWI sebagai organisasi yang mempersatukan wartawan Indonesia dalam menentang usaha kaum kolonialis yang hendak menceraikan-beraikan Indonesia.

Begitu pula dengan pendirian PWI di Makassar yang diawali dengan pembentukan IWIT (Ikatan Wartawan Indonesia Timur). Akan tetapi dalam tubuh IWIT kemudian terjadi pro dan kontra terhadap NIT (Negara Indonesia Timur). Golongan anti-NIT merasa tidak ada gunanya berada dalam organisasi yang tidak menghasilkan sesuatu bagi perjuangan kemerdekaan apalagi NIT

dianggap sebagai cara kolonialis memasukkan pengaruhnya kembali di Indonesia. Penarikan diri anggota beraliran anti-NIT menyebabkan IWIT menjadi fakum dan akhirnya hilang dengan sendirinya.

Untuk menaungi wartawan di Makassar maka dibentuklah PWI akan tetapi masih belum merupakan bagian dari PWI pusat. Pada tanggal 6 juli 1949, barulah boleh dikatakan, bahwa antara wartawan di Makassar pada khususnya dengan wartawan diluar daerah Indonesia Bagian Timur terdapat suatu hubungan yang baik, berkat diadakan di Jogjakarta sebuah konferensi antara sejumlah wartawan yang datang dari berbagai pelosok Indonesia, yang diselenggarakan oleh Pusat Persatuan Wartawan Indonesia yang berkedudukan di Jogjakarta (Kementrian Penerangan, 1953: 556).

Dimasa Orde Baru pemerintah berusaha menanamkan pengaruhnya dengan memasukkan orang-orang kepercayaan sebagai anggota PWI. Sejak tahun 1966, seperti organisasi profesi dan persatuan pekerja lainnya, PWI berada di bawah aturan dan kendali pemerintah Orde Baru (Hill, 2010: 76). Hal tersebut berdampak pada besarnya campur tangan pemerintah dalam mempengaruhi pemahaman dan pandangan PWI terhadap kebebasan pers. Bahkan untuk

mempermudah dalam melakukan pengawasan, pemerintah hanya mengakui PWI sebagai satu-satunya organisasi kewartawan.

Penobatan PWI sebagai satu-satunya organisasi kewartwanan yang diakui pemerintah merupakan cara untuk mengontrol kebebasan pers. Hal ini jelas terlihat berdasarkan Peraturan Menteri Penerangan tahun 1969 (No. 02/PER/MENPEN/1969, bab 1 pasal 3) disebutkan, “Jurnalis Indonesia wajib menjadi anggota Persatuan Wartawan Indonesia yang diresmikan oleh pemerintah” (Hill. 2010: 76).

Penerapan sistem Pers Pancasila berkaitan pula dengan pandangan PWI terhadap kebebasan pers, telah disinggung sebelumnya bahwa pengaruh pemerintah terhadap PWI begitu besar sehingga pandangan pemerintah terhadap kebebasan pers juga ditanamkan dalam PWI. Berikut pandangan PWI terhadap kebebasan pers:

Kebebasan Pers Yang Bertanggung Jawab

Kalau berbicara mengenai kebebasan pers, maka yang menjadi inti sebenarnya adalah kebebasan untuk mencari, menulis, mencetak dan menyebarkan luaskan berita melalui media masing-masing. Identitas kebebasan pers Indonesia itu, oleh para

tokoh pers terkemuka, juga disebut dengan istilah *kebebasan fungsional*. Artinya, suatu kebebasan yang mengemban suatu fungsi (Atmadi, 1985: 52).

Penerapan pers Pancasila mewajibkan pers untuk menganut ideologi tersebut apalagi telah ditetapkan dalam Undang-undang Pokok Pers tahun 1966 yang secara resmi melarang semua penerbitan yang bertentangan dengan Pancasila. Penerapan sistem pers Pancasila yang bebas dan bertanggung jawab memiliki pengaplikasian yang berbeda dalam pelaksanaannya baik oleh pers pemerintah maupun masyarakat. Perbedaan penafsiran akan kebebasan tersebut bisa dilihat dari kasus-kasus himbauan yang sering disampaikan oleh pemerintah maupun kelompok masyarakat tertentu agar suatu informasi tidak perlu diberitakan. Bahkan sampai pembredelan terhadap media yang dianggap pemberitaannya menghina atau merugikan kelompok masyarakat tertentu.

Berbicara mengenai larangan terbit di Makassar terdapat beberapa larangan peredaran barang cetakan seperti yang tertera dalam Surat Kawat Gubernur KDH Tingkat I Sul-Sel, Nomor 468/546/DSP Tanggal 6-10-1980. Ditjen Sospol Tgl 31-8-1980 No

RHS 133/KWT/SOS/DV/VII/1980, Sehubungan Dgn Dikeluarkannya SK Jaksa Agung RI Tentang Larangan Peredaran Barang Cetakan (Arsip Gubernur Kepala Daerah. Tingkat I Sulawesi Selatan "Surat kawat tanggal 6 Oktober 1980 tentang larangan peredaran barang cetakan "Indonesia di bawah sepatu laras, mimbar, menggugat pemerintah otoriter, dan lain-lain").

Adapula bentuk tanggapan pemerintah terhadap pemberitaan dalam Mingguan Umum "Perkasa" yang terbit di Makassar Minggu 1 Mei 1970 dengan Judul, "20 Djuta Rupiah Wang Pengawasan K.M.M. Mabur". Surat No.033/C.I/a/70 tanggal 9 Mei 1970 (Arsip Kepala Bagian Pengawasan KMM: Surat Tanggal 9 Mei 1970 Tentang Sorotan Mingguan Umum "Perkasa" Yang Terbit di Makassar Minggu 1 Mei 1970). berisi sorotan pemerintah terhadap pemberitaan tersebut berupa keterangan/ penjelasan yang merupakan bantahan terhadap berita tersebut yang menurut pemerintah bersifat tendensius dan sensasional.

Beberapa sorotan dan larangan peredaran barang cetakan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya pemberitaan yang dapat menjatuhkan wibawa

mereka. Apalagi mereka beralasan bahwa hal tersebut dapat mengganggu stabilitas nasional seperti yang tertera dalam surat tanggal 1 Desember 1972 tentang Ketentuan Pembinaan Dan Pengarahan Pers Nasional pada bagian II mengenai Sasaran Dan Ketentuan-Ketentuan Yang Membatasinya menyebutkan bahwa: “Atas dasar semua yang disebutkan diatas, maka sudah sewajarnya kalau kita tidak dapat mentolerir adanya kebijaksanaan pemberitaan pada Mass Media yang efeknya dapat menggoyahkan stabilitas Nasional” (Arsip Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban: Surat tanggal 1 Desember 1972 tentang Ketentuan pembinaan dan pengarahan pers nasional).

Realitas kebebasan pers masih belum dapat ditentukan sejauh mana tolak ukur yang dimaksud bebas tersebut dikarenakan adanya perbedaan pandangan konsep kebebasan pers antara pemerintah, pers dan masyarakat.

Permasalahan pokoknya bermuara pada pengertian bebas dan bertanggung jawab, sejauh mana kebebasan dalam mengutarakan pendapat dan seberapa besar tanggung jawab yang dibebani pada pers. Interpretasi tersebut tampaknya harus dijabarkan dengan lebih rinci. Rambu-

rambu pers harus lebih diperjelas. Kesan selama ini yang paling tahu dan memiliki wewenang dalam pers Pancasila adalah pemerintah dalam hal ini Menteri Penerangan. Tanpa kebebasan pers tidak mungkin menuntut tanggung jawab kepada pers. Sebaliknya tanpa tanggung jawab kebebasan pers akan kehilangan maknanya (Wawancara dengan Anwar Sanusi 9 Agustus 2017).

Meskipun kata “tanggung jawab” masih perlu dicantumkan Bersama “kebebasan pers” untuk menggambarkan tugas pers yang sebenarnya, namun masih saja terdapat kekeliruan dalam menafsirkan makna “tanggung jawab” tersebut. Dapat dirasakan antara tahun 1974 hingga 1998 konsep “tanggung jawab” lebih ditekankan dibanding “kebebasan”. Pengertiannya ditafsirkan secara tidak seimbang dimana tanggung jawab dibuat untuk menekan kebebasan. Dimana pemerintah lebih banyak membebani tanggung jawab kepada pers dibanding kebebasan menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Pemerintah selalu sensitif dengan apa yang dikatakan/ diberitakan oleh pers. Menurut pemerintah, pers bebas seperti di Amerika akan menciptakan perpecahan dan kekacauan di Indonesia. Sedangkan tanggung jawab

pers adalah untuk membantu dan mengamankan pemerintahan. Seperti yang terjadi di Makassar terhadap pemberitaan media yang dianggap sensasional oleh pemerintah yakni pemberitaan harian *Pedoman Rakyat* yang berjudul “Petugas Dipenda Kotamadya Ujung Pandang?” dimana pemberitaannya mengenai petugas yang memungut retribusi kepada para pedagang. Adapula tanggapan pemerintah terhadap pemberitaan Mingguan *Bina Baru* yang berjudul “Pembangunan Proyek di KMUP Tidak Beres” membuat pemerintah merasa perlu menanggapi pemberitaan tersebut karena dianggap dapat memunculkan opini negatif masyarakat (Arsip Gubernur Kepala Daerah. Peraturan I Sulawesi Selatan: Surat tanggal 30 Juli 1986 tentang tanggapan beberapa berita kasus).

Posisi pemerintah yang memiliki kekuasaan besar terhadap kebijakan pengaturan pers, tidak adanya batasan yang jelas tentang pelanggaran pers, dan posisi pers yang lemah dalam hukum, membuat pers tidak memiliki jalan lain selain bagi pers selain mawas diri dan melakukan langkah kooperatif terhadap pemerintah agar terhindar dari teguran bahkan pembredelan. Karena terkadang suatu kesalahan dalam

pemberitaan hanya bergantung pada keputusan pemerintah.

Kebebasan Pers Yang Mendukung Pembangunan

Pada umumnya sistem pers dikaitkan dengan bentuk sistem sosialnya dan selalu dihubungkan dengan sistem pemerintahan dimana pers itu berada. Adanya hubungan korelatif antara pers nasional dan pembangunan nasional pada era Orde Baru membawa konsekuensi bahwa bentuk dan isi pers Indonesia perlu mencerminkan bentuk dan isi pembangunan. Dengan kata lain, kepentingan pers nasional perlu mencerminkan kepentingan pembangunan nasional. Disitu dijelaskan bahwa pers nasional sebagai lembaga masyarakat yang mempunyai fungsi untuk mendukung kemajuan masyarakat lingkungannya, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyebar luaskan pesan-pesan kemajuan dan keberhasilan pembangunan kepada masyarakat pembacanya (Atmadi, 1982: 9).

Pers bertugas menyebarkan informasi yang benar dan obyektif dan menjadi penyalur aspirasi rakyat serta mengadakan kontrol sosial yang konstruktif. Dalam konteks apapun, masalah pembangunan

perlu diberitahukan oleh pers kepada masyarakat pembacanya: diberitakan, dijelaskan, dan dikomunikasikan. Dari sinilah kemudian timbul istilah “komunikasi pembangunan” (Atmadi, 1983: 10).

Untuk itu pers pembangunan bertugas turut menciptakan suasana batin masyarakat, agar dapat diliputi dengan rasa syukur, penuh harapan dan penuh kemauan untuk bekerja dan lebih tekun dalam membantu melaksanakan pembangunan (Atmadi. 1985: 10). Menurut Kakanwil Deppen Provinsi Sul-Sel Muh Jusuf Saman menyebutkan bahwa: Pers Indonesia di Jaman pembangunan ini adalah pers yang senantiasa berhati-hati dalam mengungkapkan data serta menghormati sumber beritanya. Pers yang dapat mengendalikan dirinya, terbuka serta jujur dan obyektif dalam menyampaikan informasi. Selain turut membina stabilitas nasional, pers kita berkewajiban menggerakkan pembangunan nasional (Arsip Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Sulawesi Selatan: Surat Tanggal 3 September 1988 Tentang Pembangunan Pers Pancasila Kaitannya Dengan Kewaspadan

Nasional: 5). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pers pers akan tetap memperoleh kebebasan dalam pemberitaan selama mendukung pembangunan yang dijalankan pemerintah.

Perkembangan Pers Makassar

Pada awal kekuasaan Orde Baru, Indonesia dijanjikan akan keterbukaan serta kebebasan dalam berpendapat. Masyarakat saat itu bersuka-cita menyambut pemerintahan Soeharto yang diharapkan akan mengubah keterpurukan pemerintahan Orde Lama. Pemerintah pada saat itu harus melakukan pemulihan di segala aspek, antara lain aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, dan psikologis rakyat. Indonesia mulai bangkit sedikit demi sedikit, bahkan perkembangan ekonomi pun semakin pesat.

Pada masa ini, beberapa surat kabar lama terbit kembali, *seperti Berita Baru, Angkatan Bersenjata, Ekspres Minggu* dan *Progresif* yang terbit pada masa sebelumnya, kemudian melanjutkan penerbitannya. Selain itu terbit pula beberapa surat kabar baru dengan orientasi baru dalam tahun 1965/1966 di Makassar seperti *Orde Baru* (dipimpin oleh Arsal Al Habsi), *Tritura* (dipimpin oleh H. A. Rasyid Ali), *Hanura* (Dipimpin oleh M. Said) dan *SKU-*

KAMI (dipimpin oleh M. Alwi Hamu) (Anwar, 2010: 212).

Pada masa permulaan Orde Baru di Makassar, tetap terdapat tiga tipe pers, yaitu “pers independen” (*Pedoman Rakyat, Ekspres Minggu dan Progresif*), “pers pemerintah” (*Angkatan Bersenjata* edisi Sulawesi Selatan) dan “pers partai” (*Duta Masyarakat*) serta “pers ormas” (Mertjusuar dan SKU-KAMI). Namun dalam perkembangannya sesudah tahun 1966, baik pers pemerintah ataupun pers partai di Makassar tidak mengalami perkembangan (Anwar, 2010: 217). Hal ini diakibatkan oleh berkembangnya pers menjadi lahan bisnis yang menguntungkan, banyaknya pemodal yang berinvestasi membuat pers berkembang menjadi pers bisnis.

Berikut beberapa perkembangan terbitan pers di Makassar:

- Tahun 1982 : Menurut Surat Izin Terbit dari Departemen Penerangan RI tercatat enam buah, masing-masing harian pagi *Pedoman Rakyat* dengan oplah 16.500 eksemplar, harian pagi *Fajar* dengan oplah 5.000 eksemplar, harian sore *Tegas* dengan oplah 4.500 eksemplar, *Mimbar Karya* dengan oplah 12.500 eksemplar, *Gema* dengan oplah 4.000 eksemplar, dan *Berita Baru* dengan oplah 3.000 eksemplar. Jumlah oplah seluruh penerbitan

45.500 eksemplar. Diantara penerbitan ini, hanya tiga yang dapat melayani pembacanya setiap hari, yakni harian *Pedoman Rakyat*, harian *Fajar*, dan *Tegas*. Tiga lainnya (*Mimbar Karya*, *Gema* dan *Berita Baru*) penerbitannya tidak teratur rata-rata seminggu sekali.

- Tahun 1983 : Penerbitan harian *Pedoman Rakyat*, *Fajar*, dan *Tegas* sama keadaannya dengan tahun 1982. Juga *Mimbar Karya* edisinya tetap mingguan. *Gema* dan *Berita Baru* masing-masing hanya terbit 23 kali dan 9 kali sepanjang tahun ini (1983).
- Tahun 1984 : *Pedoman Rakyat* dan *Fajar* secara umum keadaan sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Harian *Tegas* hanya terbit 273 kali selama tahun ini (dibandingkan dengan *Pedoman Rakyat* 329 kali dan *Fajar* 307 kali). *Mimbar Karya* tetap edisinya mingguan, sedang *Gema* dan *Berita Baru* makin jarang terbitnya (tercatat masing-masing 18 dan 4 kali saja).
- Tahun 1985 : *Pedoman Rakyat* tetap terbit normal (335 kali). *Fajar* mencapai 299 kali terbit. *Tegas* hanya 65 kali (mulai Mei sampai dengan Desember sama sekali tidak terbit). *Mimbar Karya* rata-rata tetap dapat terbit mingguan, *Gema* makin

turun frekuensi terbitnya menjadi hanya 8 kali, dan *Berita Baru* tetap 4 kali.

- Tahun 1986 : *Pedoman Rakyat* tetap terbit menurut periodenya (352 kali), *Fajar* 247 kali (November hanya terbit dua kali dan Desember satu kali), *Tegas* juga makin berkurang frekuensinya, yaitu hanya 24 kali (Maret sampai dengan Juli dan Oktober sampai dengan Desember sama sekali tidak terbit, sedangkan Agustus dan September masing-masing hanya terbit satu kali). *Mimbar Karya* tetap terbit mingguan, *Gema* dan *Berita Baru* sama sekali sudah tidak terbit.
- Tahun 1987: *Pedoman Rakyat* tetap terbit teratur sepenuhnya sebagai harian. *Fajar* makin menurun pula frekuensinya, yaitu sepanjang tahun ini hanya mampu terbit sebanyak 179 kali (selama Januari sama sekali tidak pernah terbit). *Tegas* juga hanya 36 kali terbit, dan *Mimbar Karya* rata-rata 4 kali sebulan, *Gema* dan *Berita Baru* sama keadaannya dengan tahun 1986 yakni tidak pernah terbit (Achmad, 1990: 101-102).

Dari pemaparan diatas tampak bahwa hanya *Pedoman Rakyat* benar-benar terbit secara teratur dengan status (SIUPP). terbitan lainnya masih

bergelut dengan persoalan-persoalan, yakni belum memperoleh SIUPP, kurangnya modal, terkendala dalam pemasaran, dan kurang kekompakan dalam tubuh penerbitan.

Perkembangan pers dalam menggunakan alat-alat jurnalistik seperti komputer dan fotografi akan membantu industri pers dalam menyiarkan berita secara cepat dan akurat dari sumber utama. Pers yang dulunya terbatas pada media cetak saja telah merambah media elektronik juga seperti televisi.

Untuk daerah Makassar televisi baru diperkenalkan pada bulan September 1972, pada tahap awal warga Makassar baru menikmati siaran percobaan. Pembangunan stasiun siaran dilaksanakan oleh sebuah panitia, terdiri dari unsur-unsur Pemerintahan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Madya Ujung Pandang, RRI, Kantor Wilayah Departemen Penerangan, dengan bekerjasama PT. National Gobeldan mitra usahanya dari Jepang, Matsushita Electric Company. Setahun kemudian (8-2-1973) siaran percobaan diresmikan statusnya sebagai jaringan TVRI (Televisi Republik Indonesia) yang berada dalam jajaran Departemen Penerangan. Siaran berita pertama dari TVRI Ujung Pandang dimulai 2 Agustus 1975 setelah tahapan-tahapan

siaran percobaan dan penyempurnaan organisasi, Teknik dan sumber daya manusia memungkinkan (Achmad, 1990: 110).

Meskipun tekanan pemerintah terhadap pers tetap berjalan akan tetapi memasuki periode 1990-an kehidupan pers mengalami perubahan apalagi kesadaran masyarakat untuk mengetahui tentang informasi sekitarnya mulai meningkat.

Perubahan tersebut juga dipengaruhi oleh pergeseran kekuasaan politik pemerintahan menuju kepada kepentingan-kepentingan ekonomi. Hal ini terjadi karena kekuasaan pemerintah dan militer kian menciut, sementara kekuasaan dan pengaruh pemilik modal makin besar. Kalangan pengusaha menuntut kebebasan investasi dalam sektor media cetak serta keleluasaan menentukan sendiri produk pers untuk dijual ke pasar yang serba dinamis tanpa harus terbelenggu batasan dan aturan pemerintah (Hill. 2010: 172).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh disimpulkan bahwa posisi Deppen dan PWI dianggap memiliki peranan penting dalam mengontrol kebebasan pers. Pemerintah melalui PWI mewajibkan setiap wartawan untuk

menjadi anggota PWI dan instansi ataupun perorangan yang hendak dijadikan sumber berita diharuskan untuk menanyakan kartu PWI selain kartu pers. Memasuki periode 1990-an kehidupan pers mengalami perubahan apalagi kesadaran masyarakat untuk mengetahui tentang informasi sekitarnya mulai meningkat. Perubahan tersebut juga dipengaruhi oleh pergeseran kekuasaan politik pemerintahan menuju kepada kepentingan-kepentingan ekonomi. Posisi PWI dianggap sangat penting karena menjadi pintu bagi individu yang ingin menjadi wartawan. PWI dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengontrol siapa saja yang hendak menjadi wartawan.

Penelitian ini menyarankan agar pemerintah harus membantu terciptanya iklim bekerja yang memungkinkan pers menjalankan fungsinya tanpa ada intervensi. Sebaliknya pers harus terus mengembangkan profesionalitas sehingga menjamin akurasi dan keseimbangan informasi berdasarkan fakta. Masyarakat juga harus mengembangkan kepekaan, daya nalar dan daya kritis terhadap informasi yang didapatkan jangan sampai keliru ataupun terprovokasi terhadap informasi yang dibumbui dengan kepentingan politik baik dari individu ataupun lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Anwar. 2007. *Pers & Politik Indonesia*. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Persada Indonesia Y.A.I. Jakarta
- Arifin, Anwar. 2010. *Pers dan Dinamika Politik*. Yarsif Watampone. Jakarta.
- Atmadi, T. 1985. *Sistem Pers Indonesia*. Seksama. Jakarta.
- Hill, David T. 2011. *Pera di Masa Orde Baru*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Nuruddin. 2007. *Sistem Komunikasi Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Said, Tribuana. 1988. *Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan*
- .
- Suryabrata, Sumadi. 2003. *Metodologi Penelitian*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Tesis/Disertasi

- Achmad, A.S. 1990. *Urgensi Sebagai Faktor Dalam Sebaran Berita (Kasus Ujung Pandang)*. Disertasi. Fakultas Pascasarjana. Universitas Hasanuddin
- Taufik, Muhammad. 2002. *Hubungan Kepentingan Pengusaha Dan Penguasa Dalam Bisnis Pers*. Tesis. Program Studi Ilmu Politik. Universitas Indonesia.

Arsip

- Gubernur Kepala Daerah. Peraturan I Sulawesi Selatan: Surat Tanggal 30 Juli 1986 Tentang Tanggapan Beberapa Berita Kasus.
- Gubernur Kepala Daerah. Tingkat I Sulawesi Selatan "Surat Kawat Tanggal 6 Oktober 1980 Tentang Larangan Peredaran

Barang Cetakan "Indonesia Di Bawah Sepatu Laras, Mimbar, Menggugat Pemerintah Otoriter, Dan Lain-Lain".

Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Sulawesi Selatan: Surat Tanggal 3 September 1988 Tentang Pembangunan Pers Pancasila Kaitannya Dengan Kewaspadaan Nasional.

Kepala Bagian Pengawasan KMM: Surat Tanggal 9 Mei 1970 Tentang Sorotan Mingguan Umum "Perkasa" Yang Terbit Di Makassar Minggu 1 Mei 1970.

Kode Etik Jurnalistik

Komando Operasi Pemulihan Keamanan Dan Ketertiban: Surat Tanggal 1 Desember 1972 Tentang Ketentuan Pembinaan Dan Pengarahan Pers Nasional.

Pembinaan Idiil Pers

Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PWI

Peraturan Menpen No.01/PER/MENPEN/1984 Tentang Prosedur dan Persyaratan Mendapatkan SIUPP

Presiden Republik Indonesia: Undang-Undang Nomor II Tahun 1966 Tanggal 12 Desember 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers.

SK Menpen No. 47/KEP/MENPEN/1975 Tentang Pengukuhan PWI dan SPS

Undang-Undang Pokok Pers No. 21 Tahun 1982 Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan Pokok Pers